



1000

**GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
TANPA MERUSAK LINGKUNGAN**

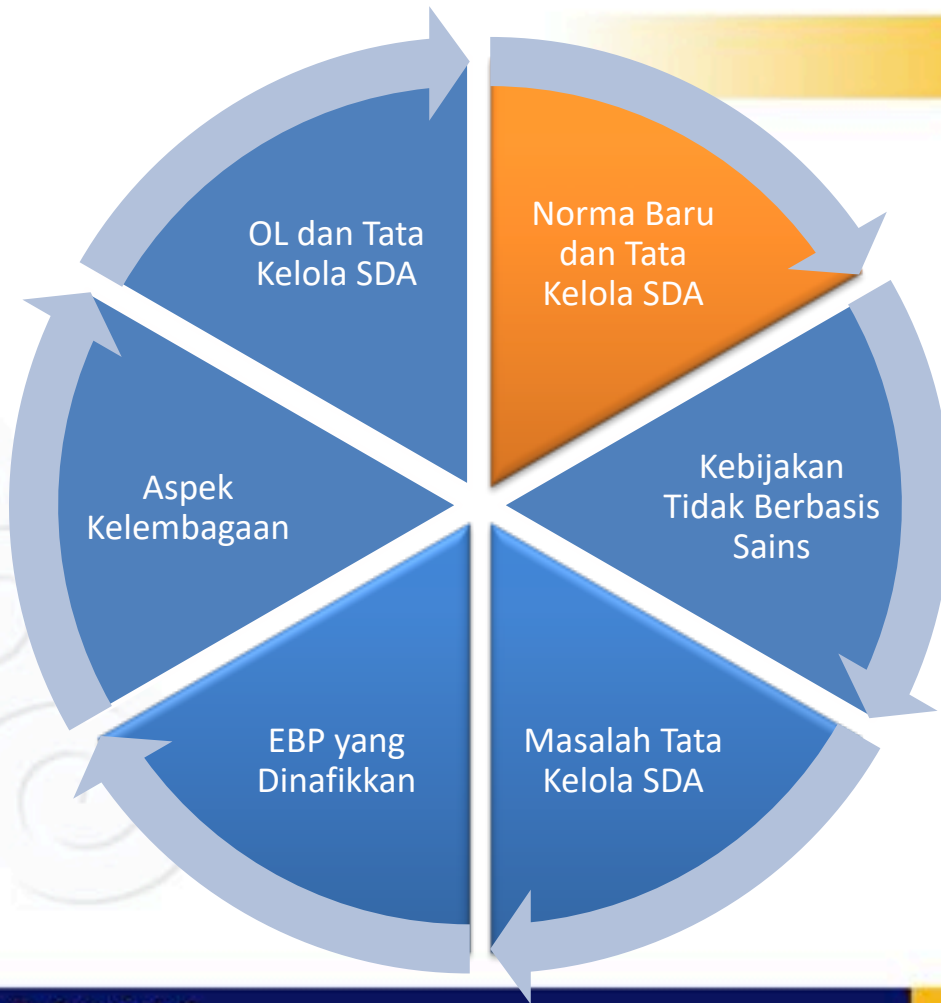


UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Perubahan Norma Akibat Pandemi dan Kebutuhan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam

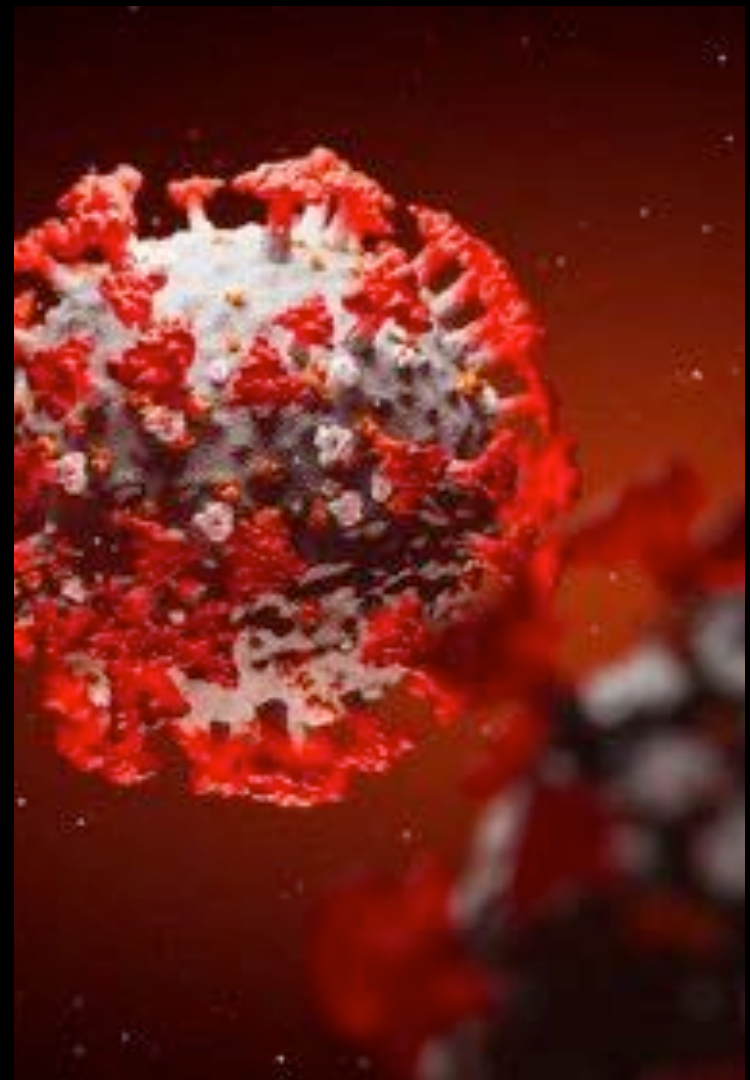


Rimawan Pradipto  
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada  
09 Juli 2020



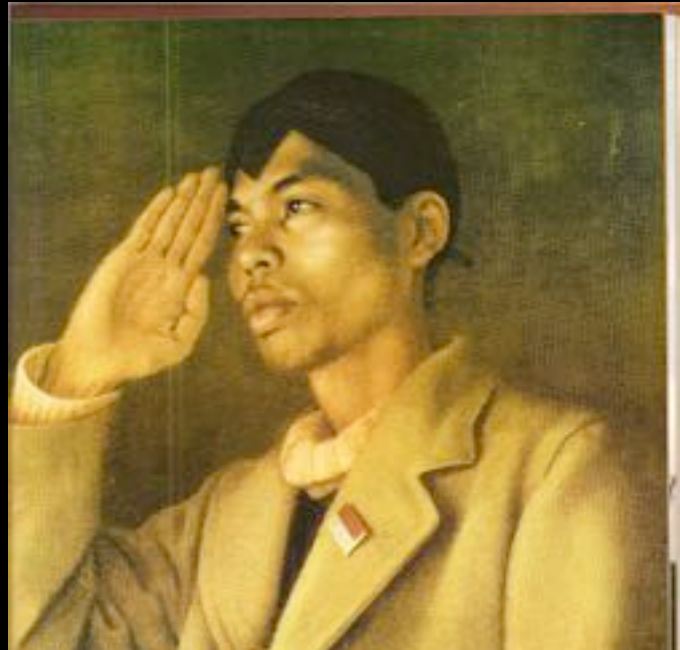
# Pandemi Sebagai Pemicu Perubahan *Nature*

- Pandemi menyerang semua negara, setara dampaknya dengan PD 1 dan PD 2. Pandemi adalah *public enemy (non-excludable dan non-rival)*, dan menjadi beban umat manusia.
- Kontraksi ekonomi pasti terjadi dan perekonomian tiap negara mendadak menjadi autarky.
- Evidence-based policy menjadi semakin dibutuhkan di masa pandemi ini. Kebijakan anti sains terbukti gagal dan memperburuk dampak pandemi.
- Tidak ada negara yang siap dan keuangan negara manapun terbatas untuk mengatasi covid-19 selama minimum 2-3 tahun ke depan.
- Mobilitas sumber daya melalui modal sosial menjadi alternative cara untuk menanggulangi covid-19 beserta dampaknya.



# Game Apa yang Kita Mainkan?

- Kita memainkan survival game, dan kita tidak tahu kapan game akan berakhir (mirip *infinitely repeated game*).
- Mutasi virus terjadi dan terbuka potensi wave ke-2 dan ke-3 dari covid-19 sebelum vaksin ditemukan (*evolutionary game*).
- Strategi apa yang diterapkan menghadapi covid-19?
  - Mobilisasi seluruh sumber daya untuk fokus menanggulangi covid-19
  - Adaptasi semua aktivitas kehidupan yang aman terhadap covid-19.
- Tujuan strategi: memastikan rakyat SURVIVE menghadapi covid-19 SELAMA KAPANPUN pandemic covid-19 ini terjadi!!
- Kelangkaan sumber daya menjadi norma baru yang akan mengubah tata nilai, cara berfikir dan bertindak. Kebutuhan terhadap sains (evidence-based policy) jauh lebih dibutuhkan dibandingkan masa sebelum covid-19.



# Masalah Pembangunan di Indonesia



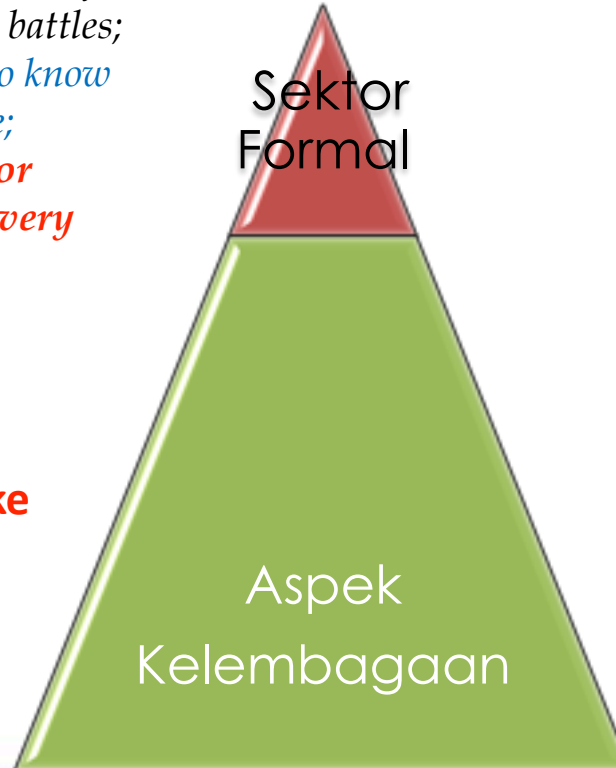
Sun Tzu in Wee (2003):

- *If you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles;*
- *if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one;*
- *if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.*

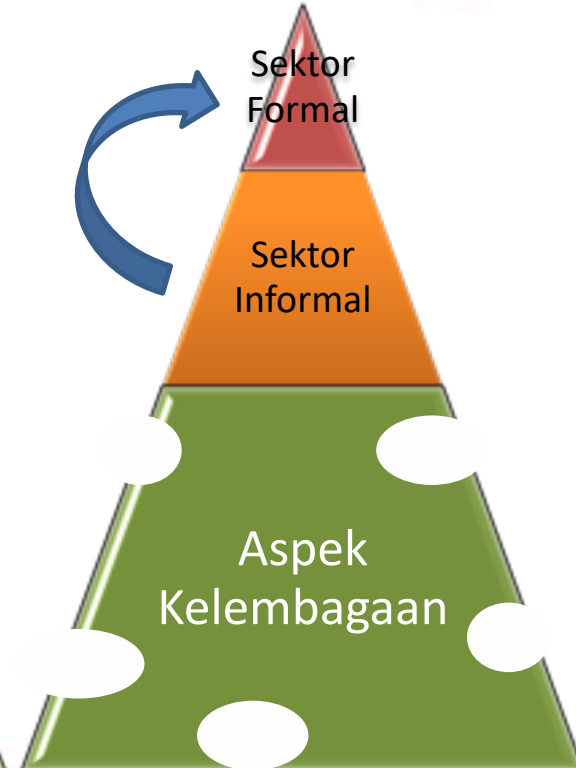
**Masalah pembangunan kita:**

- 1. Kita tidak cukup mengetahui siapa “diri” dan “lawan kita”;**
- 2. Transformasi sektor informal ke formal;**
- 3. Aspek kelembagaan yang lemah, sehingga korupsi dan ekonomi biaya tinggi marak**

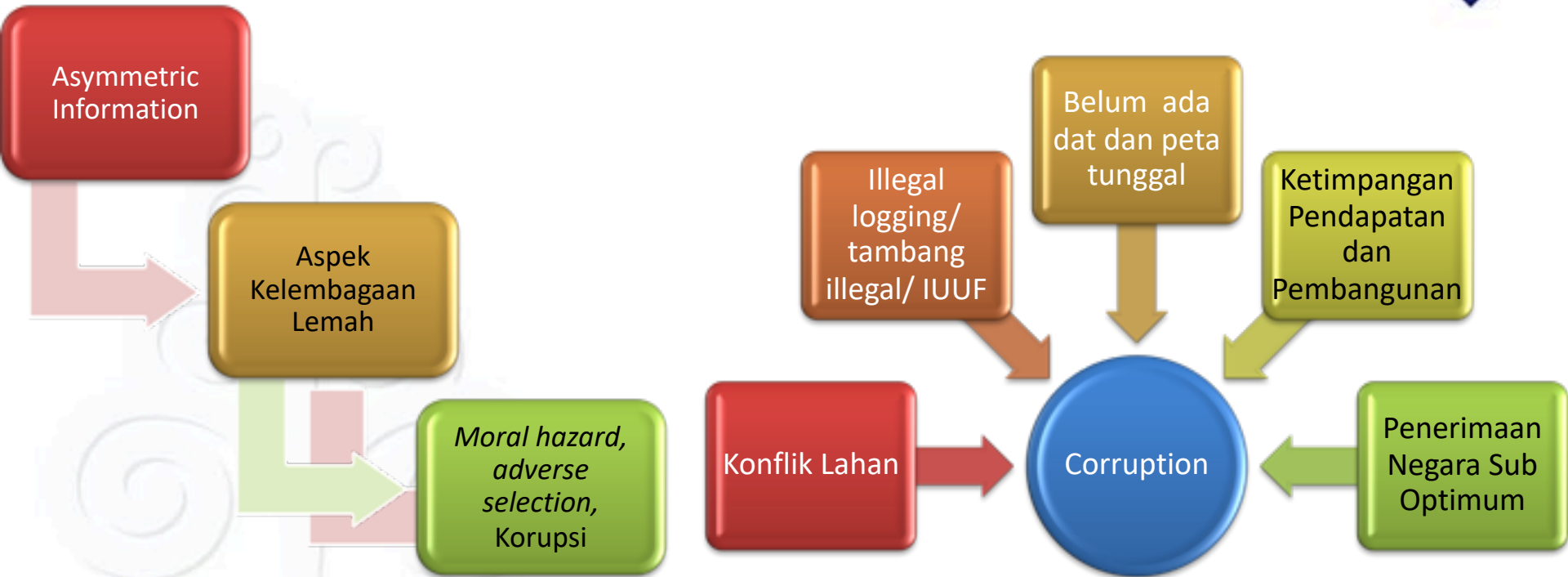
Negara Maju



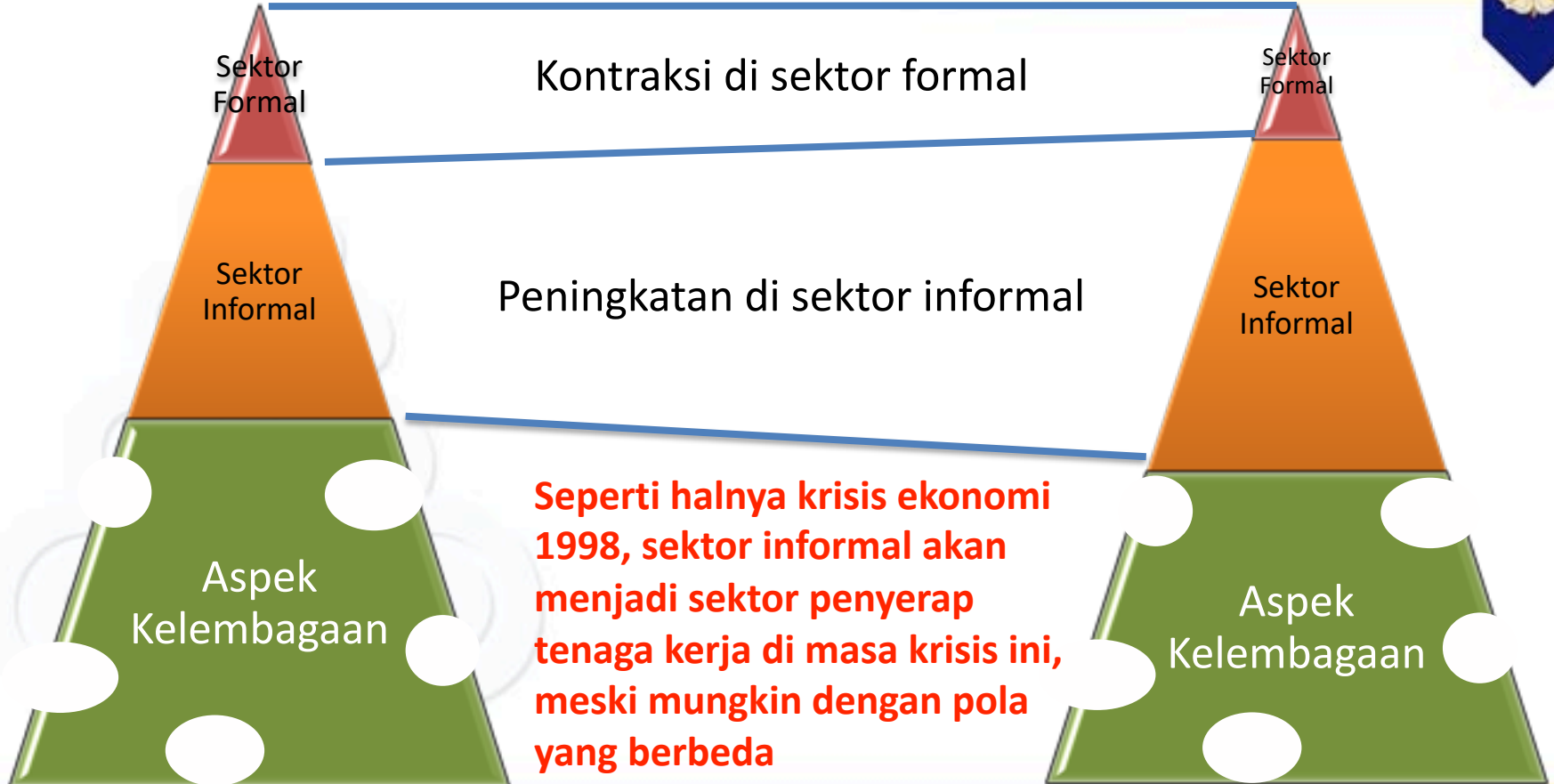
Indonesia



# Kendala Aspek Kelembagaan



# Dampak Pandemi





# Norma Baru: Adaptasi Terhadap Covid-19



Kita masih berada di fase tanggap bencana, sehingga strategi recovery terhadap covid-19 belum layak diterapkan

- VUCA (vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity)
- Terjadi secara evolutionary

Pra Covid-19

Covid-19

- VUCA meningkat secara revolusi (serentak dan cepat)
- Adaptasi cara hidup dan proses bisnis mengikuti Covid-19

- Recovery pasca tanggap bencana (setelah pandemic berakhir)
- Norma baru ditentukan norma mayoritas yang berkembang di masa pandemi (Munjid, 2020)

Post Covid

Tidak ada ketentuan tentang kapan pandemic berakhir, karena upaya menemukan vaksin belum membuahkan hasil. Apapun strategi yang dipilih, harus mempertimbangkan kapasitas SDM dan fasilitas kesehatan.

# Norma Baru dan Tata Dunia Baru

- Perang dunia/ krisis ekonomi/ pandemi, membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan
- Pasca PD-2, adidaya berpindah dari UK ke USA
  - Banyak negara Asia dan Afrika merdeka
  - Muncul blok Barat dan blok Timur
  - Perubahan drastis memperlakukan negara yang kalah perang
- **Saat ini norma sedang bergerak menuju ke norma baru (new norms) dan tidak logis membicarakan RUU saat ini.**



# Perubahan Proses Bisnis Semua Aspek Kehidupan

Kejujuran dan transparansi sangat dibutuhkan\*

Kebutuhan terhadap sains meningkat

Empati dan jaringan sosial berkembang

Pola interaksi baru jadi kelaziman

Perubahan Aktivitas Ekonomi

*Reversed Engineering\*\**



# Perubahan Norma

## Norma Lama

Seolah Tidak ada kelangkaan

Tidak ada Cense of Crisis

Sulit Koordinasi

Tidak Jujur (Tidak Transparan)

Orientasi Input/Output

## Norma Baru

Kelangkaan Sumber Daya

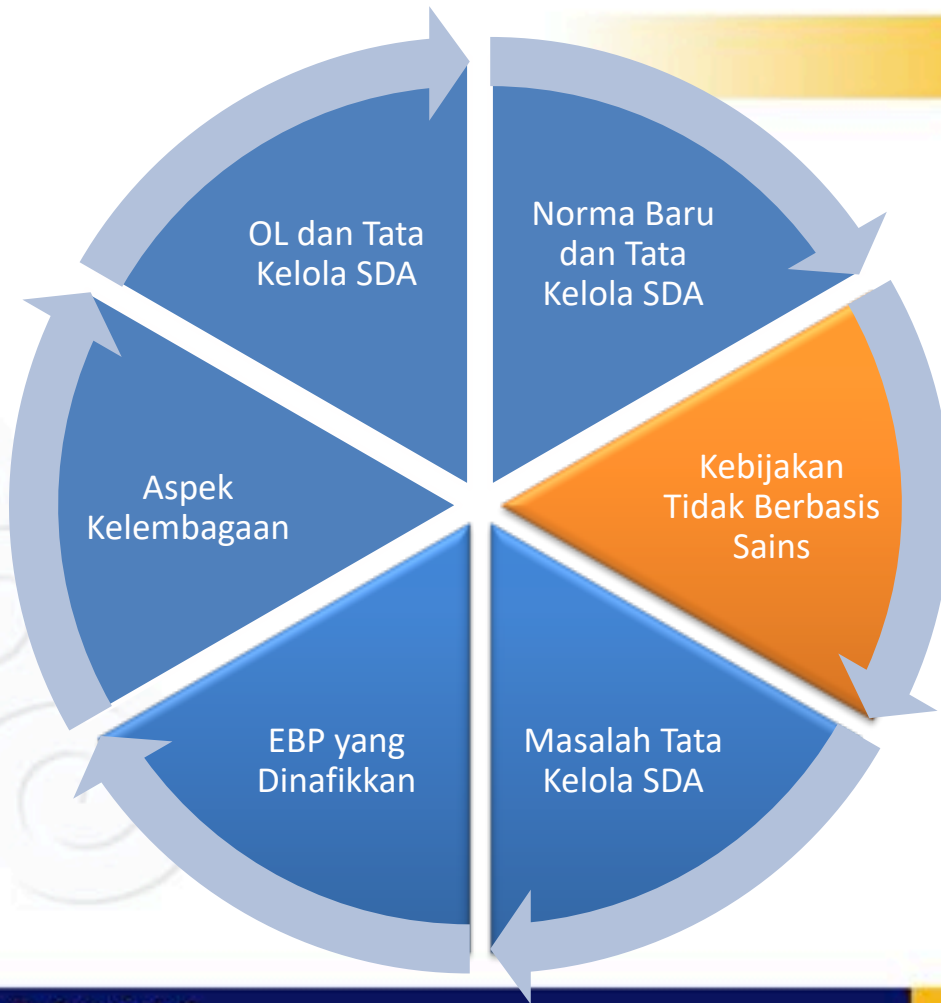
*Sense of Crisis* Tinggi

Suka membantu/ sinergi (warm-glow giving\*)

Jujur (Transparan)

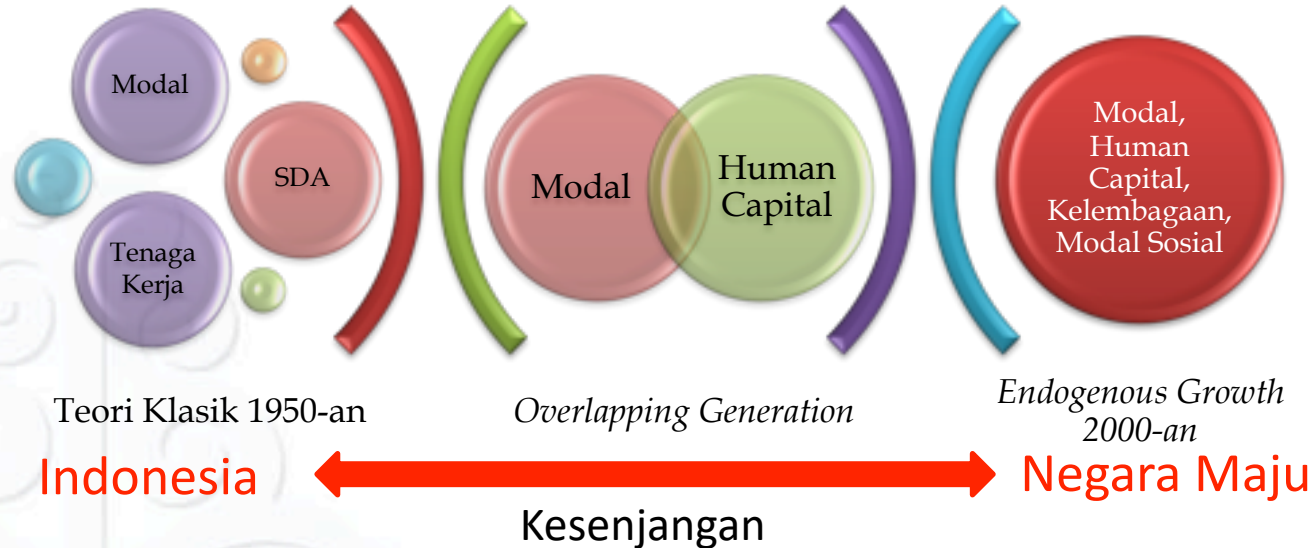
Orientasi Outcome







# Status Quo Bias Strategi Pembangunan



Meskipun teori ekonomi telah mengakui peran *human capital* dan aspek **kelembagaan** sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi di Indonesia belum memprioritaskan kedua aspek tersebut.

Sumber: Satu Indonesia; Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Adil, dan dan Mandiri, Pradiptyo dkk, (2018)

# Sekilas *Endogenous Growth Model*



- Tiap perusahaan memerlukan investasi, terutama di human capital dan R and D (teknologi baru/ inovasi), sehingga peningkatan teknologi adalah faktor endogen.
- Diperlukan insentif pasar untuk melakukan R and D dan mengembangkan human capital.
  - Meski tidak spesifik disebutkan, aspek kelembagaan diperlukan untuk menciptakan insentif pasar (property right, korupsi di perizinan rendah, extortion rendah, rent seeking behavior rendah, dll)
- Teknologi baru diasumsikan partially excludable (akibat paten) yang hanya menghasilkan quasi-rent.
- Teknologi adalah non-rival input
- Terjadi eksternalitas positif dari penemuan teknologi baru.

# Natural Resource-Curse Hypothesis (RCH-1)

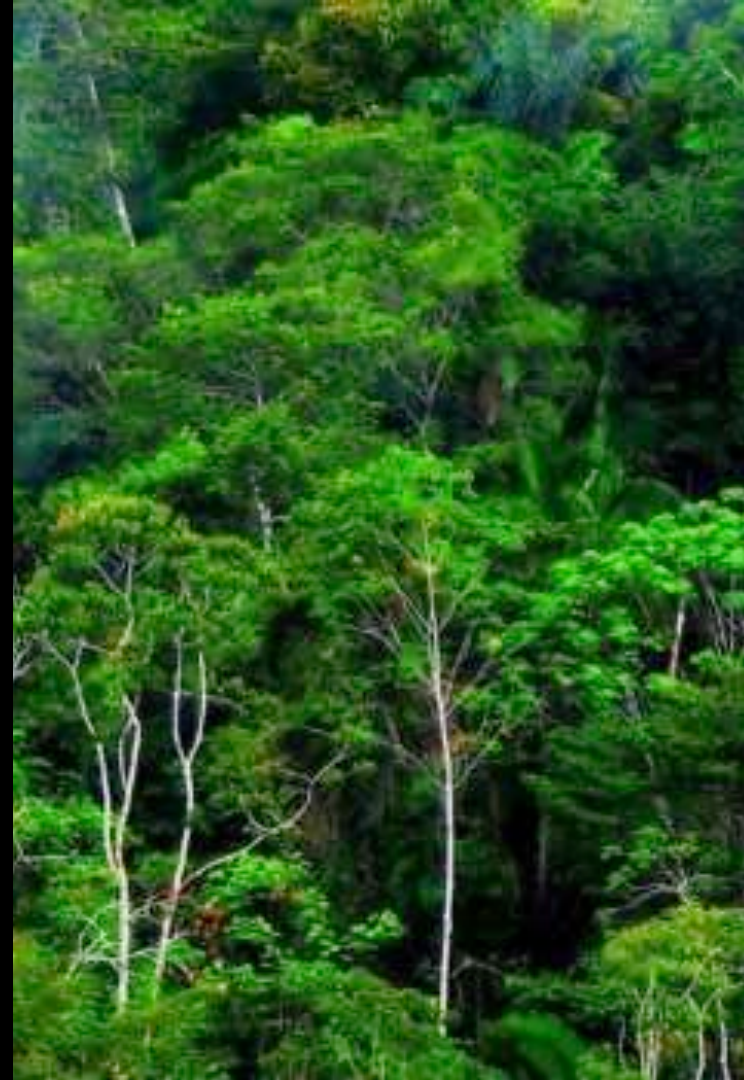


- Australia, Malaysia dan Chile adalah negara kaya SDA namun terhindar dari RCH karena mereka memprioritaskan perbaikan aspek kelembagaan dan pembangunan human capital.
- OL Cipta Kerja hanya melanggengkan *Natural Resource Curse Hypothesis* di Indonesia!!



# NRCH-2

- Fakta menunjukkan negara dengan sumber daya melimpah rata-rata memiliki kinerja pembangunan ekonomi yang rendah dibanding negara-negara dengan sumber daya alam terbatas (Sachs and Warner, 1995, 1997, Venables, 2016).
- Mayoritas negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah memiliki kualitas kelembagaan yang lemah (Adams, et al., 2019, Amiri, et al., 2019, dan Dwumfour dan Ntow-Gwamfi, 2018).



# NRHC-3

- Hasil studi empiris menunjukkan bahwa hipotesis *natural resource-curse*, hanya terbukti terjadi di negara yang kaya dengan sumber daya alam dengan kualitas kelembagaan yang lemah Amiri, et al., (2019). Di negara dengan tingkat kelembagaan yang rendah, peningkatan penerimaan dari sumber daya alam justru menekan pertumbuhan sektor manufaktur dan pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi Amiri, et al., (2019).
- Dalam jangka panjang, sejalan dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan konsumsi terhadap barang impor meningkat sementara term of trade produk ekspor cenderung mengalami penurunan, sehingga tekanan neraca pembayaran akan cenderung meningkat



# Ekonomika Kelembagaan

- Aspek kelembagaan, baik formal maupun informal, berdampak terhadap kinerja pembangunan suatu negara.
  - Tidak ada negara maju dengan tingkat korupsi tinggi, korupsi di BUMN dan BUMS diatur setara
  - Tidak ada negara maju yang tidak mengatur semua aspek kehidupan (sistem antrian, cara merokok, buang sampah, hingga menentukan warna cat rumah dll)
  - Hak kepemilikan jelas, sistem insentif yang rasional dan manusiawi, negara menguasai data penduduk dan sumber daya alam.
- Bagaimana menciptakan *incentive compatibility* agar semua tujuan nasional (Pembukaan UUD 1945 alinea 4) tercapai?
  - Mengapa di Omnibus Law tujuan hanya sebatas Indonesia di tahun 2045?
  - Mengapa Omnibus Law hanya fokus pada upaya menarik investasi?
- Mengapa perbaikan aspek kelembagaan dinafikkan di OL Cipta Kerja?



# Korupsi Struktural di Indonesia



## Kondisi Korupsi Saat Ini

Korupsi telah didesain dari sejak perencanaan dan penyusunan peraturan

Aturan yang ada justru mendorong orang melakukan korupsi

Aturan tanpa teori dan peraturan yang tidak dapat ditegakkan

*State-capture corruption*

UU Tipikor ketinggalan jaman

## Hal yang Belum Diatur

Korupsi Swasta

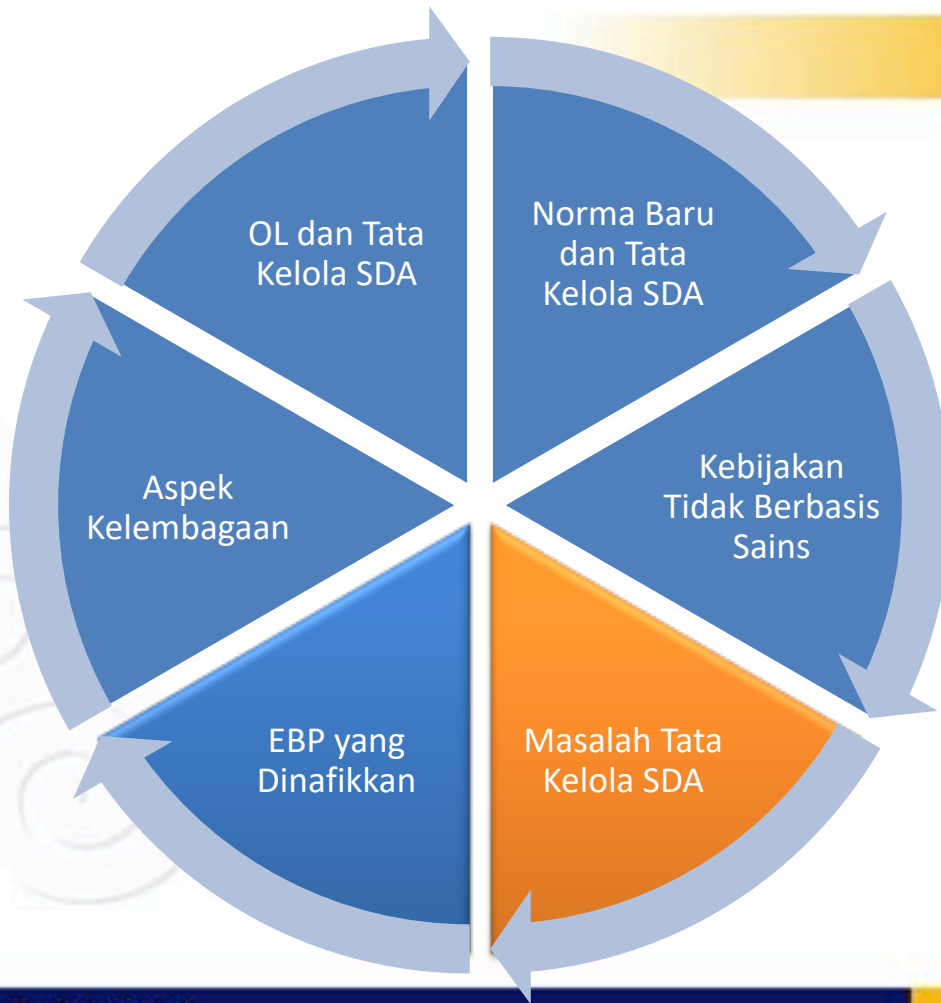
Korupsi staff asing

*Illicit Enrichment*

*Trading of Influence*

# Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan





# Masalah Tata Kelola SDA



- Sumber masalah dari tata kelola SDA bermuara pada korupsi
- Salah satu penyebab korupsi adalah system insentif yang tidak rasional dan tidak manusiawi
  - Penyerapan anggaran sebagai KPI
  - Take home pay ASN meningkat sejalan dengan penyerapan anggaran
  - Sulitnya koordinasi karena heterogenitas system insentif di sektor public.
  - Status quo bias terhadap upaya perbaikan
- **Kecenderungan penerapan kebijakan anti sains (menafikkan *evidence-based policy*)**



# Kerusakan Lingkungan dan Konflik Lahan

- Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh:
  - Perubahan iklim (faktor eksogen)
  - Masalah perijinan di sektor ekstraktif (faktor endogen)
    - Penambangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan
    - Korupsi di bidang perijinan
- Konflik lahan marak di Indonesia dan faktor utama penyebab konflik lahan adalah:
  - Praktik korupsi perijinan di daerah-daerah terkait konsesi perijinan pertambangan dan perkebunan.





# Korupsi dan Konflik Agraria



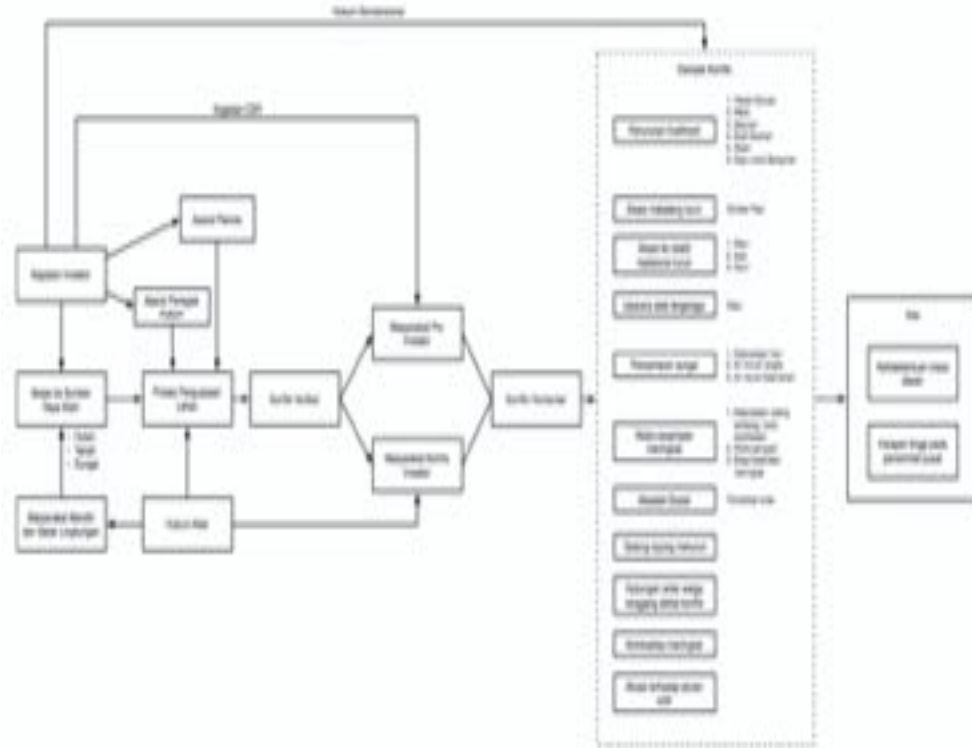
2016: 450 konflik agraria, 1.265.027 ha, 86.745 KK (Komnas HAM & KPA, 2017)

2000-2014: 1.391 konflik agraria, 5.711.396 Ha, 926.700 KK (Komnas HAM, KPA & Walhi, 2014)

BPN: Dampak konflik 607.886 Ha lahan menjadi tidak produktif, kerugian negara Rp 146 Triliun

Pola serupa juga terjadi di lima negara lain di Asia (Yasmi, dkk, 2012)

## Peta Mental Korban Konflik Lahan



# Karakteristik Konflik Agraria

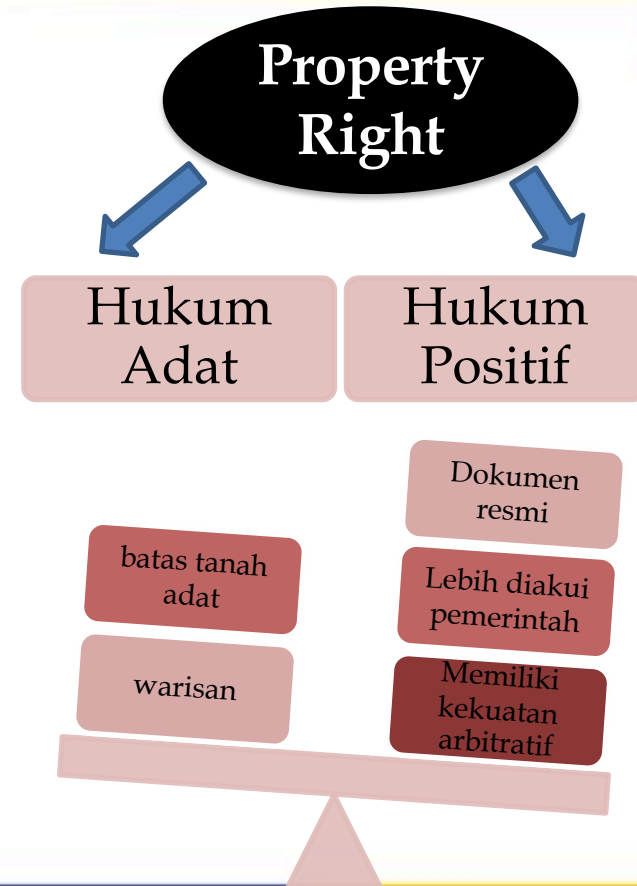


Konflik Bersifat Vertikal,  
Horizontal atau Keduanya

Konflik bersifat dinamis  
(intertemporal)

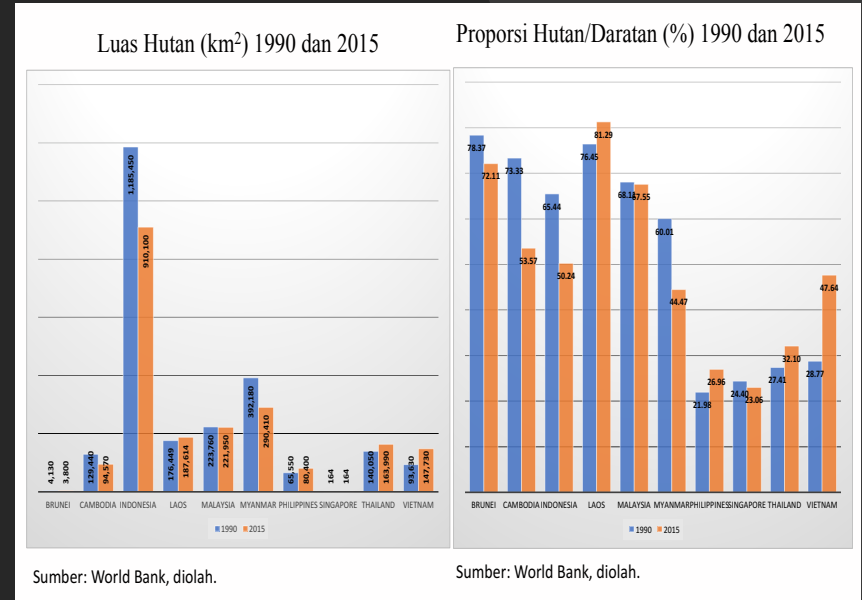
Konflik berpotensi  
berevolusi

Dampak konflik tetap ada  
meski konflik telah berakhir



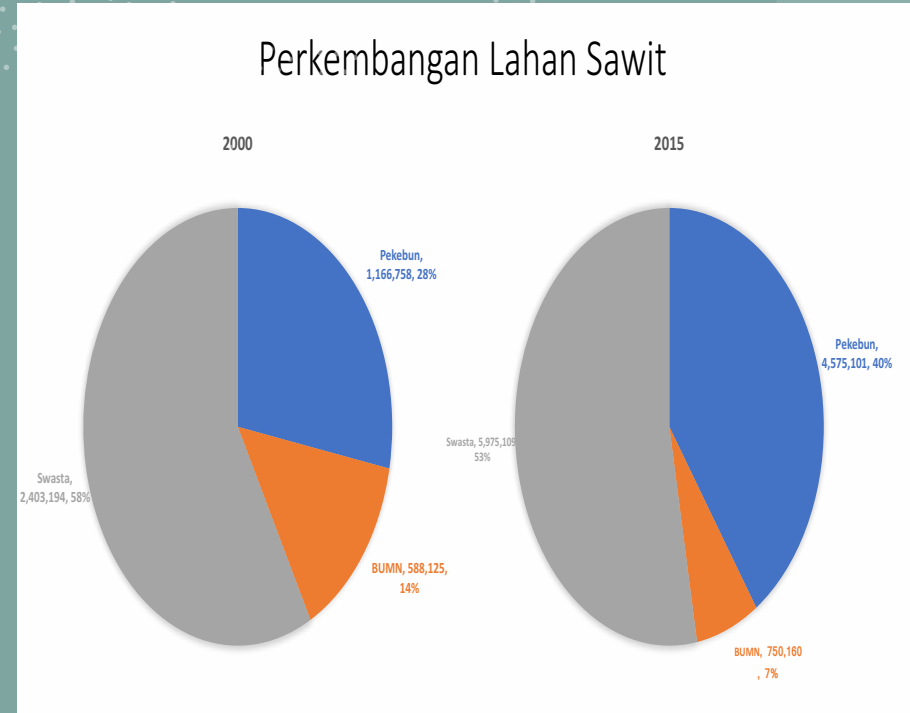
# Alih Fungsi Hutan di ASEAN

- Negara-negara ASEAN:
  - Penurunan luas lahan: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja Brunei
  - Peningkatan luas lahan hutan: Vietnam, Laos, Filipina, Thailand
- Alih fungsi hutan terbesar di ASEAN 1990-2015:
  - Indonesia: 275.350 km<sup>2</sup>, jauh lebih luas hutan daripada Malaysia tahun 1990: 237.760 km<sup>2</sup>
- 50% lahan sawit 2005 di Malaysia dan Indonesia, adalah hutan di tahun 1990 (Vijay, dkk 2016, Koh dan Wilcove, 2008).



# Perkembangan Lahan Sawit 2000-2015

- Luas lahan sawit meningkat hampir 300% selama 2000-2015 (BPS)
- Luas lahan sawit 2015 (BPS) – 11,30 juta Ha, luas lahan sawit 2015 (KPK, 2016) 15,7 juta Ha.
- Rata-rata pertumbuhan kebun sawit 2000-2015 adalah 6,9%/tahun (BPS)
  - Perkebunan rakyat 9,8%/tahun
  - Perusahaan swasta 6,3%/tahun
  - BUMN 1,7%/tahun
  - Semua analisis ini belum memasukkan unsur *beneficiary ownership*!!
- Rata-rata pertumbuhan produksi (2000-2015) 8,81%/tahun

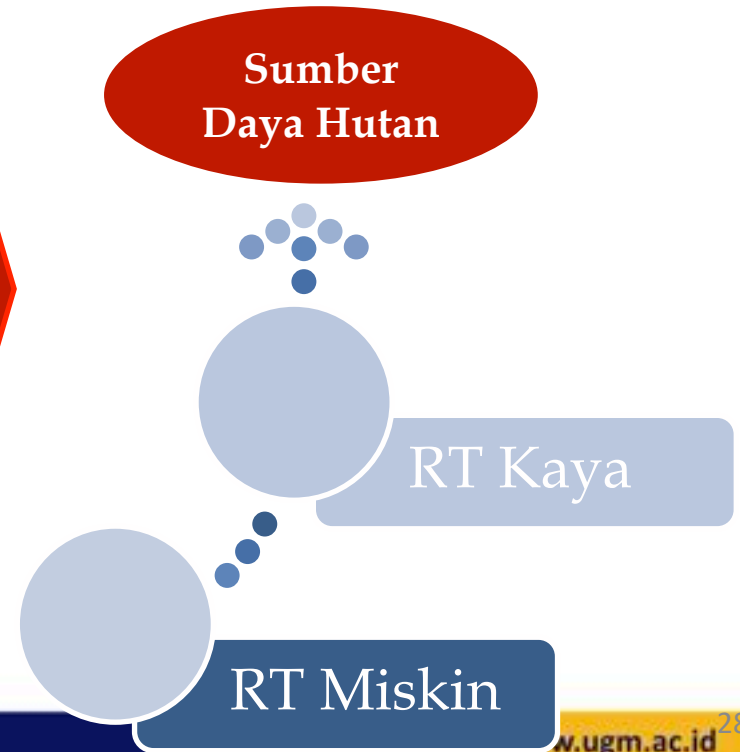
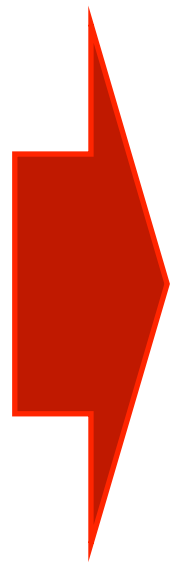
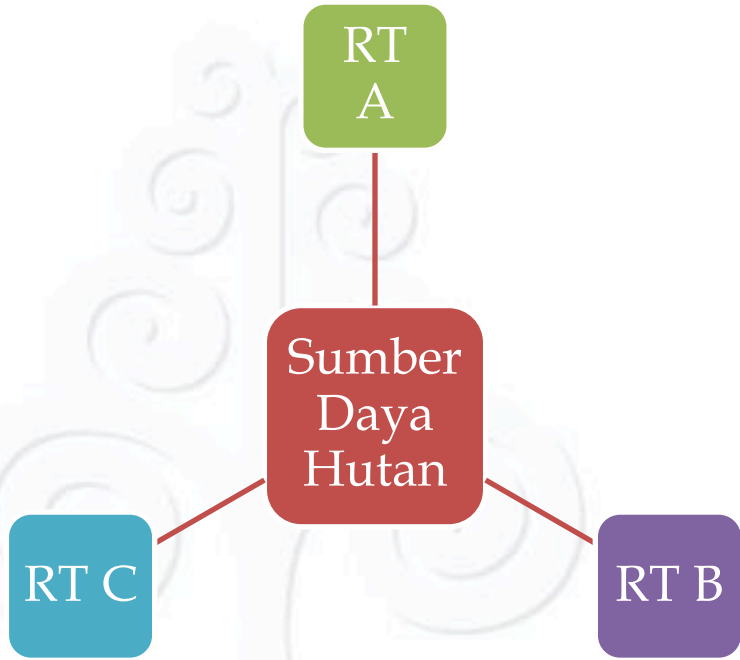


# Transformasi Pola Produksi dan Konsumsi



Homogenitas Akses Ke Sumber  
Daya Hutan

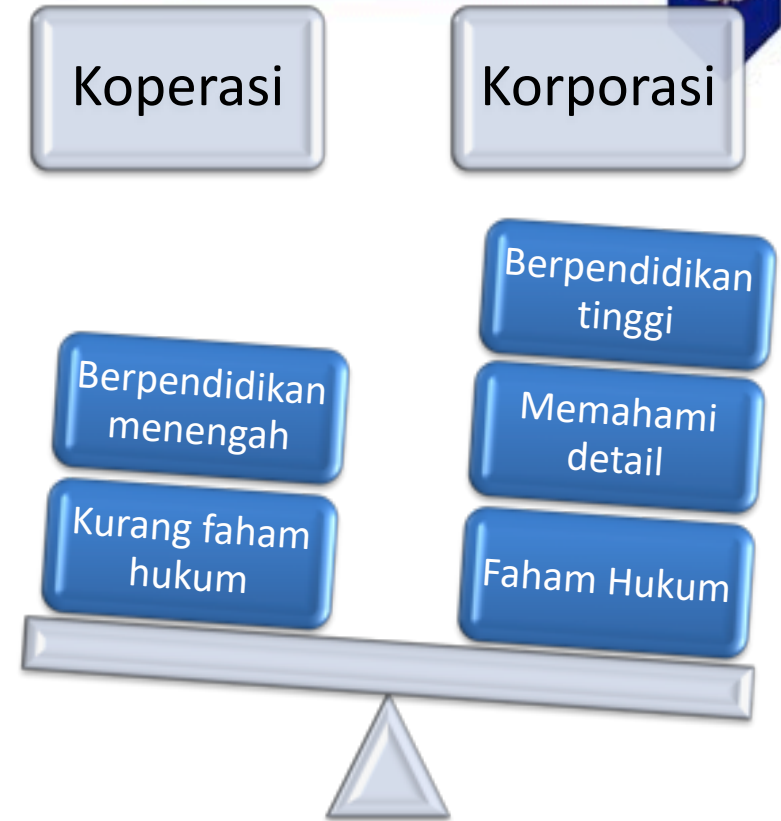
Heterogenitas Akses Ke Sumber  
Daya Hutan



# Masalah Kemitraan



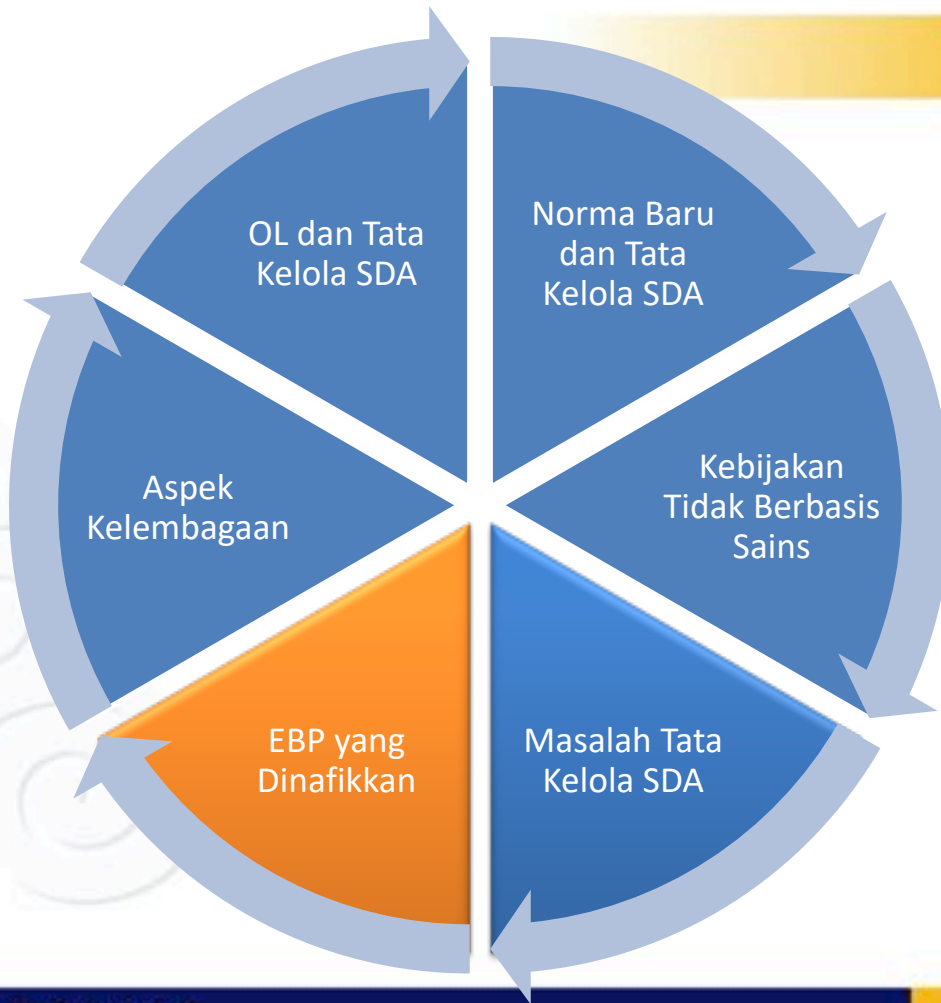
- Hubungan kemitraan cenderung asymmetric
  - Korporasi yang sangat canggih dan memiliki akses ke kekuasaan berhadapan dengan koperasi yang memiliki kemampuan terbatas
  - Draft perjanjian diajukan oleh pihak korporasi, sementara kemampuan kognitif masyarakat terbatas
- Didasarkan pada UU UMKM pengawasan terhadap kemitraan dilakukan oleh KPPU
  - Kantor cabang KPPU terbatas
  - Kewenangan KPPU untuk menegakkan peraturan juga terbatas.



# BO dan *Corporate Criminal Liabilities*

- Menarik untuk dijajagi antara pendaftaran BO dengan PerMA 13/2016 ttg corporate criminal liabilities
- Bagaimana mengaitkan antara keduanya, jika misalnya ada perusahaan SDA yang melakukan pelanggaran kriminal berat?
- Perlu dicatat Indonesia sedang dalam upaya untuk kembali menjadi anggota FATF dan terdapat proses assessment FATF terhadap Indonesia. Ini adalah momentum yang tepat untuk perubahan.







# Perbaikan Kelembagaan



- KPK melalui program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, bekerja sama dengan 26 K/L melakukan upaya perbaikan aspek kelembagaan
- KKP membentuk Satgas 115 (anti IUUF) untuk memperbaiki aspek kelembagaan di sektor perikanan tangkap
- Beberapa K/L memperbaiki tata kelola perijinan dan pengawasan

Monitoring *compliance* pelaku usaha

Audit kepatuhan meliputi spatial, sosial dan lingkungan

Perbaikan sistem dan regulasi

Koordinasi dan supervisi permasalahan lintas K/L

Deteksi "Special Case"

*Breakthrough* dan *debottlenecking* permasalahan lintas K/L/D

Sumber: KPK, 2019



# Aksi Taktis

Rencana aksi taktis dilakukan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan persoalan PSDA yang aktual dalam jangka pendek.

**Membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai instrumen pengendalian.**

**Rekonsiliasi informasi dan data.**

**Audit kepatuhan dan koordinasi penataan kewajiban.**

Pengembangan SIPUHH dan SIPHPL, pangkas biaya informal.

Penegakan hukum penggunaan KH tidak sah.

Pembangunan SIPERIBUN.

Rekonsiliasi perizinan di daerah, pemetaan tutupan kebun.

Integrasi izin kebun di Prov. Kalteng, review CnC kebun.

Pembangunan MOMI dan MODI, ePerizinan, ePNBP.

Penyelesaian CnC IUP tambang.

Blokir izin.

SIMKADA, VMS, perizinan online.

Pengukuran ulang kapal.

Penegakan hukum, penenggelaman kapal.

Sumber: KPK, 2019

KEHUTANAN

PERKEBUNAN

PERTAMBANGAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERTANAHAN

# Dampak GNP-SDA Terhadap Penerimaan Negara



Sektor Perkebunan Sawit (Rp triliun)



Sektor Kehutanan (Rp triliun)



PNBP BLU BDPKKS (Rp triliun)



PNBP Kehutanan (Rp triliun)



Sektor Minerba (Rp triliun)



Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp triliun)



PNBP Minerba (Rp triliun)



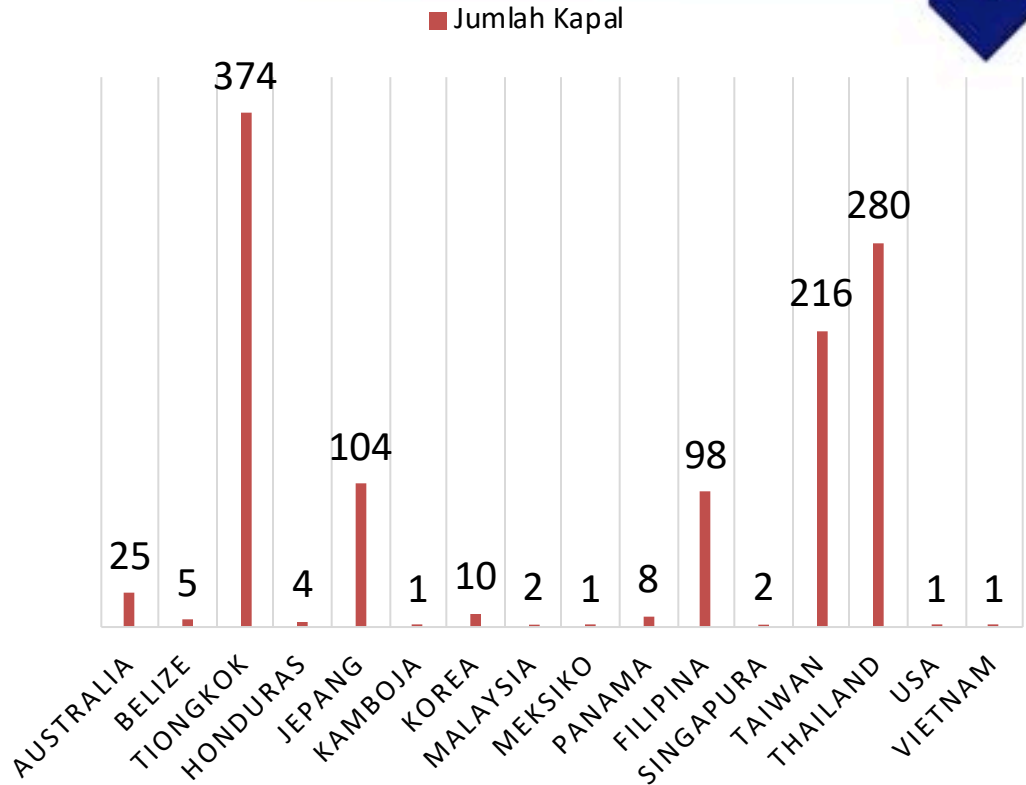
PNBP Perikanan (Rp triliun)



# ANALISIS DAN EVALUASI KAPAL EKS-ASING

- 1132 kapal ikan eks-asing menjadi obyek Anev
- Kapal tersebut dimiliki oleh 187 perusahaan
- Kapal tersebar di 33 pelabuhan di Indonesia

JUMLAH KAPAL EKS-ASING OBJEK ANEV



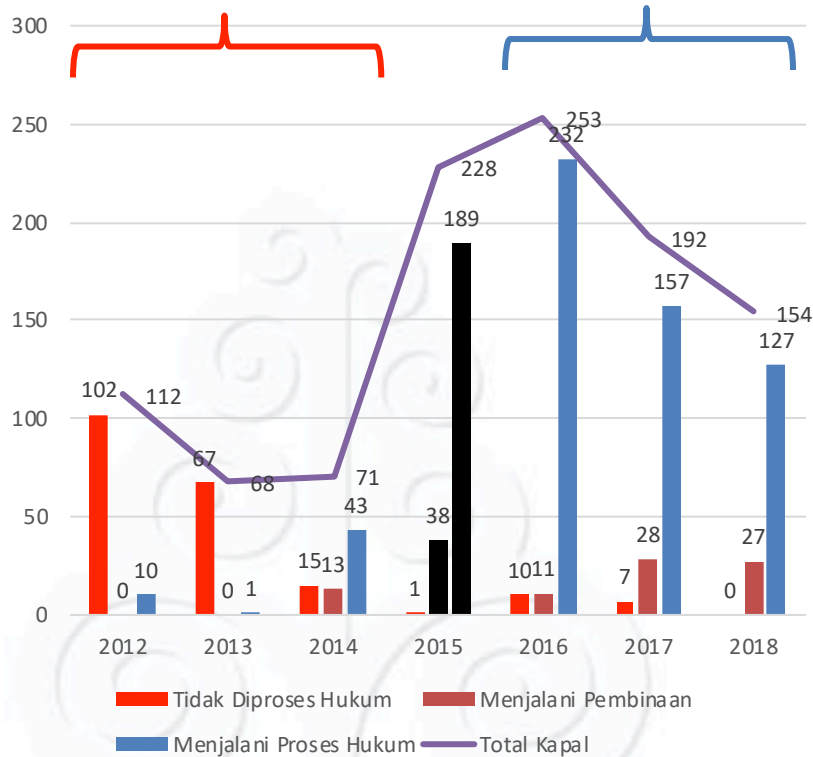
## Tindak Pidana Perikanan dan Terkait

- IUUF termasuk kejahatan serius, mengingat IUUF umumnya tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan kejahatan berat lainnya (UNCLOS, 2000).
- Setiap upaya menanggulangi dan mencegah IUUF pada dasarnya juga mencegah dan menanggulangi kejahatan serius lainnya.

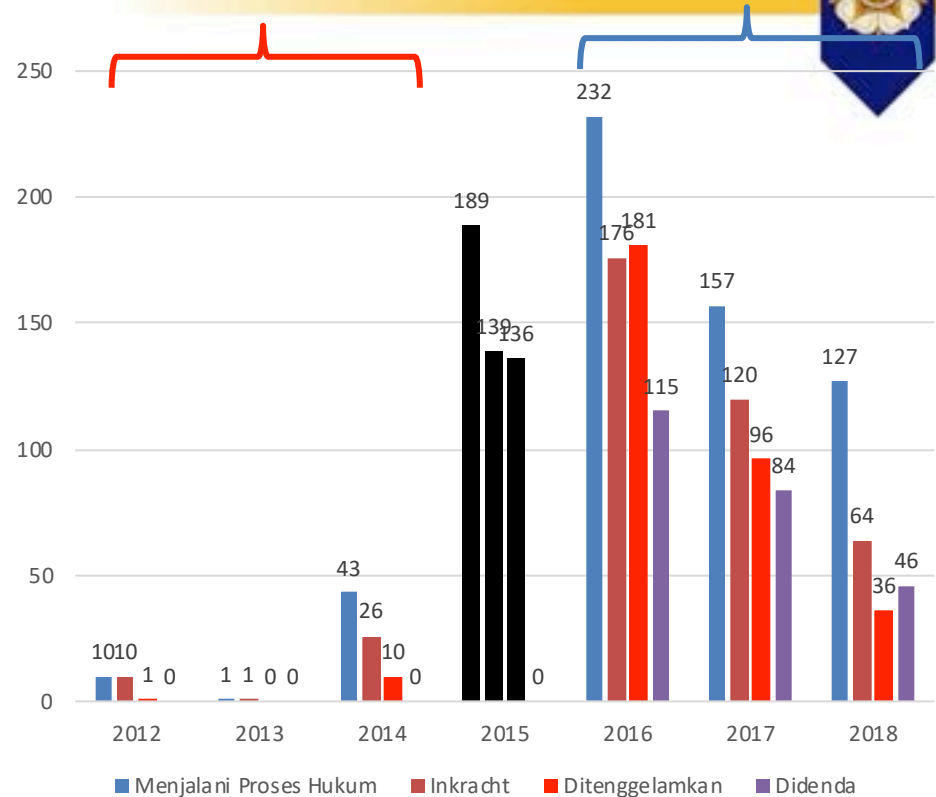
Tindak Pidana di Bidang Perikanan		Tindak Pidana Lain
1. Pemalsuan dokumen kapal	8. Pemalsuan laporan penangkapan ikan	1. Transaksi illegal BBM di tengah laut
2. Registrasi dan bendera ganda	9. Ekspor tanpa dokumen yang diperlukan	2. Pelanggaran keimigrasian
3. Penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah	10. Menangkap di luar WPP yang diizinkan	3. Tindak pidana kepabeanaan
4. Marked down ukuran kapal	11. Menggunakan alat tangkap yang dilarang	4. Pencucian uang
5. Mempekerjakan nahkoda/ABK asing	12. Tidak memiliki/ bermitra dengan UPI	5. Penghindaran tindak pidana perpajakan
6. Tidak aktifkan transmitter kapal	13. Tidak mendaratkan tangkapan di pelabuhan yang ditentukan	6. Penyelundupan dan perdagangan narkoba
7. Alih muatan illegal di tengah laut		7. Perdagangan orang (perbudakan)
		8. Tindak pidana korupsi

Sumber: KKP, 2019

# Peningkatan *Detection* dan *Conviction* Rates

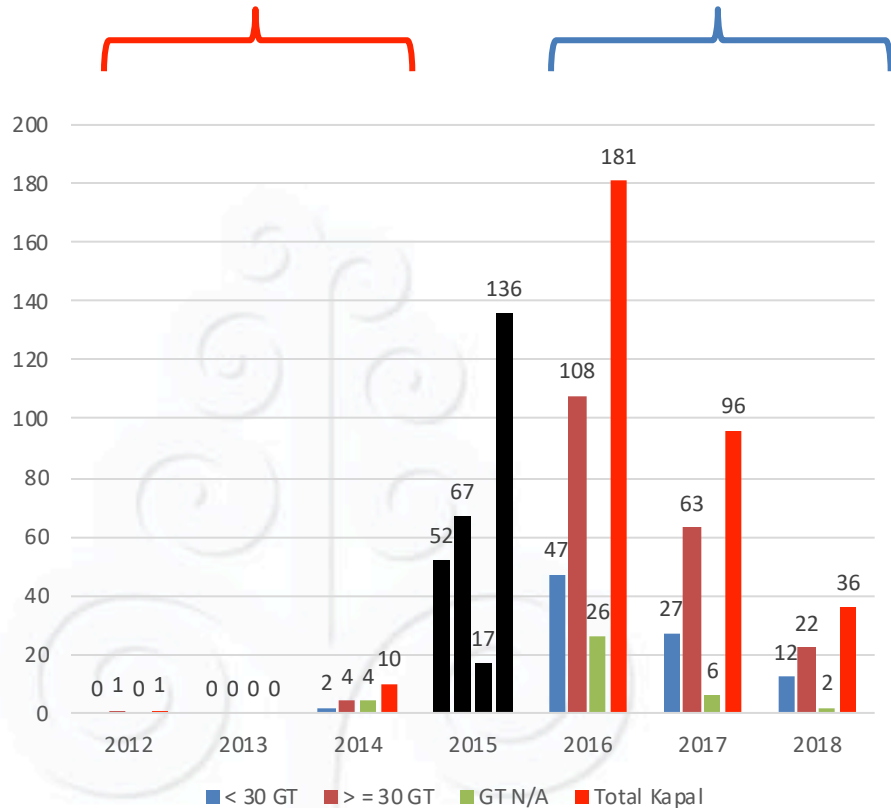


Distribusi Penanganan Kapal Pelanggar Hukum 2012-2018

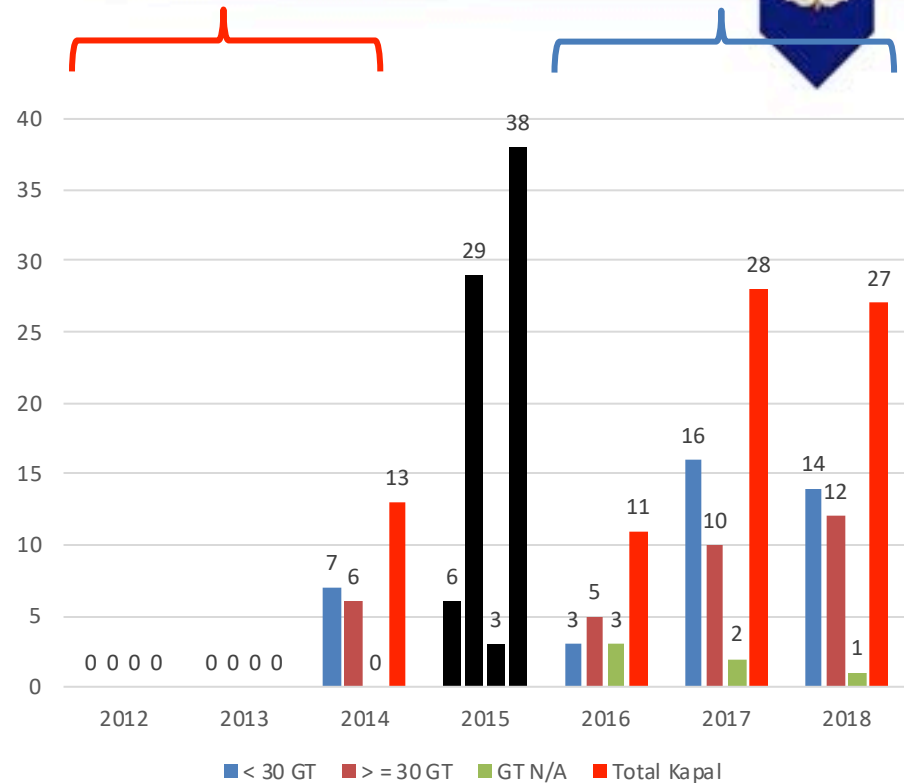


Distribusi Hukuman Terhadap Kapal IUUF 2012-2018

# Penenggelaman dan Pembinaan Kapal

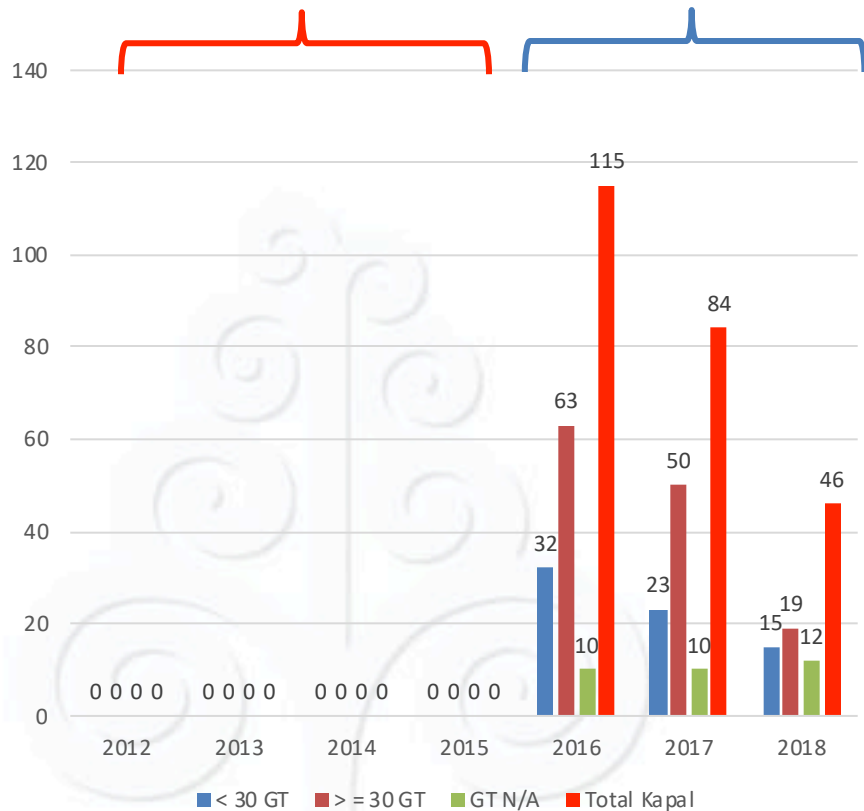


Distribusi Kapal yang Ditenggelamkan 2012-2018

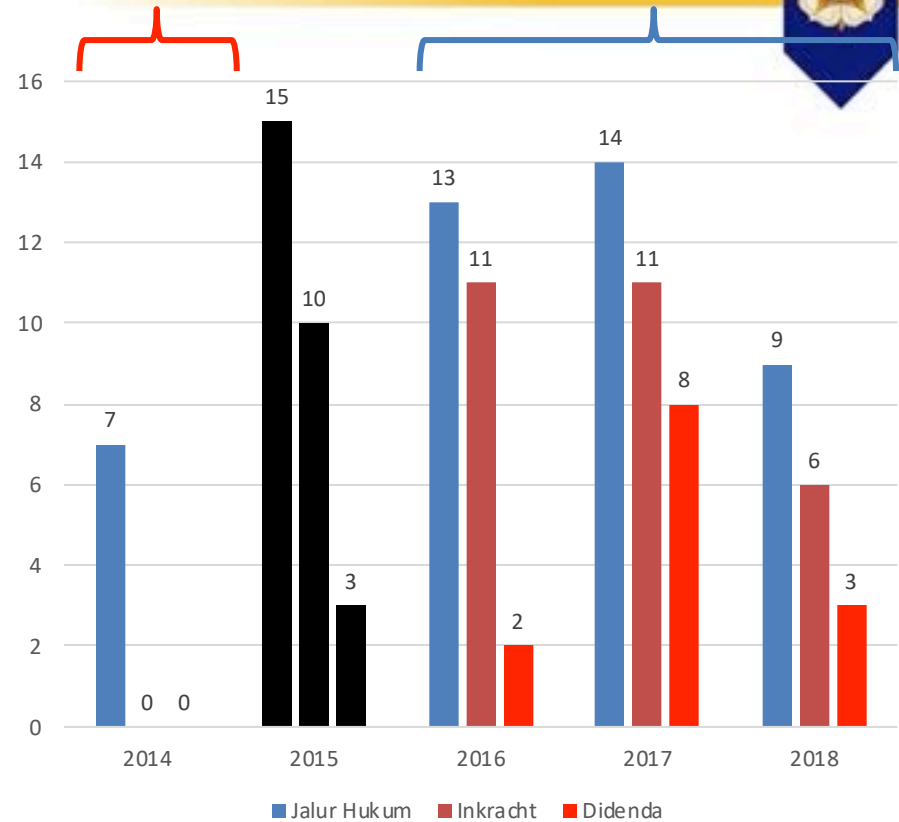


Distribusi Kapal yang Dibina 2014-2018

# Penindakan Terhadap Kapal dan Non Kapal



Distribusi Kapal yang Didenda 2012-2018



Penindakan Terhadap Non Kapal



# KAPAL-KAPAL IKAN ASING PELAKU IUUF YANG DITANGKAP DI INDONESIA



- IUUF adalah trans national organized crime.
- Banyak kapal-kapal asing dengan tonase besar, melakukan pencurian lintas negara
- Tercatat 7 kapal yang menjadi buron Interpol, berhasil di tangkap oleh Satgas 115.
- IUUF adalah tanggung jawab semua negara untuk menanggulangnya.



MV SILVER SEA 2



FV VIKING



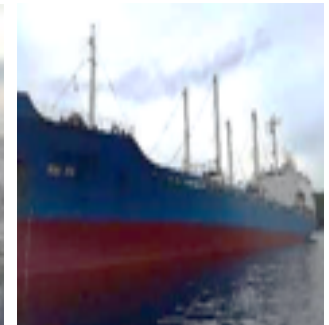
HUA LI 8



FV STS 50



FV FU YUAN YU 831



HAI FA



# Dampak GNP-SDA

Peningkatan penerimaan negara

Penguatan fungsi pengendalian pemerintah

Penurunan biaya informal

Peningkatan standar pelayanan publik

# Apa yang terjadi?



Kesenjangan proses bisnis

Pembiaran moral hazard

Birokratisasi permasalahan

Minim Akuntabilitas

State-capture corruption



# Kendala: Dualisme Sistem Kelembagaan

## Sistem Birokrasi



Perkembangan Teknologi

- Sistem birokrasi dan administrasi tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi, ekonomi dan demokrasi.
- Aspek keberlanjutan pembangunan dipertanyakan.

VS

VS

Sistem Administrasi

Demokrasi & Perekonomian Modern



# Heterogenitas Sistem Insentif Sektor Publik

KPK, BI, OJK dan BRR	Kemenkeu dan K/L Reformasi Birokrasi	K/L non Reformasi Birokrasi
Single salary system dengan nilai gaji yang manusiawi (gaji = pendapatan)	Non single salary system namun elemen gaji tidak banyak dan total salary lebih manusiawi	Non single salary system, elemen gaji banyak dan nilai gaji tidak manusiawi
Pendapatan tidak terkait dengan jumlah kegiatan	Campuran (mixed)	Pendapatan meningkat sejalan dengan aktivitas (penyerapan)
Job description ada dan berorientasi ke outcome	Job description sudah ada meski belum tentu berorientasi ke outcome	Job description tidak ada
<b>Non-Pecatable (Kecuali KPK)</b>	<b>Non-Pecatable</b>	<b>Non-Pecatable</b>
Dampak: orientasi kerja fokus ke outcome (kinerja)	Dampak: campuran (mixed)	Dampak: orientasi kerja fokus ke output atau upaya menciptakan kegiatan

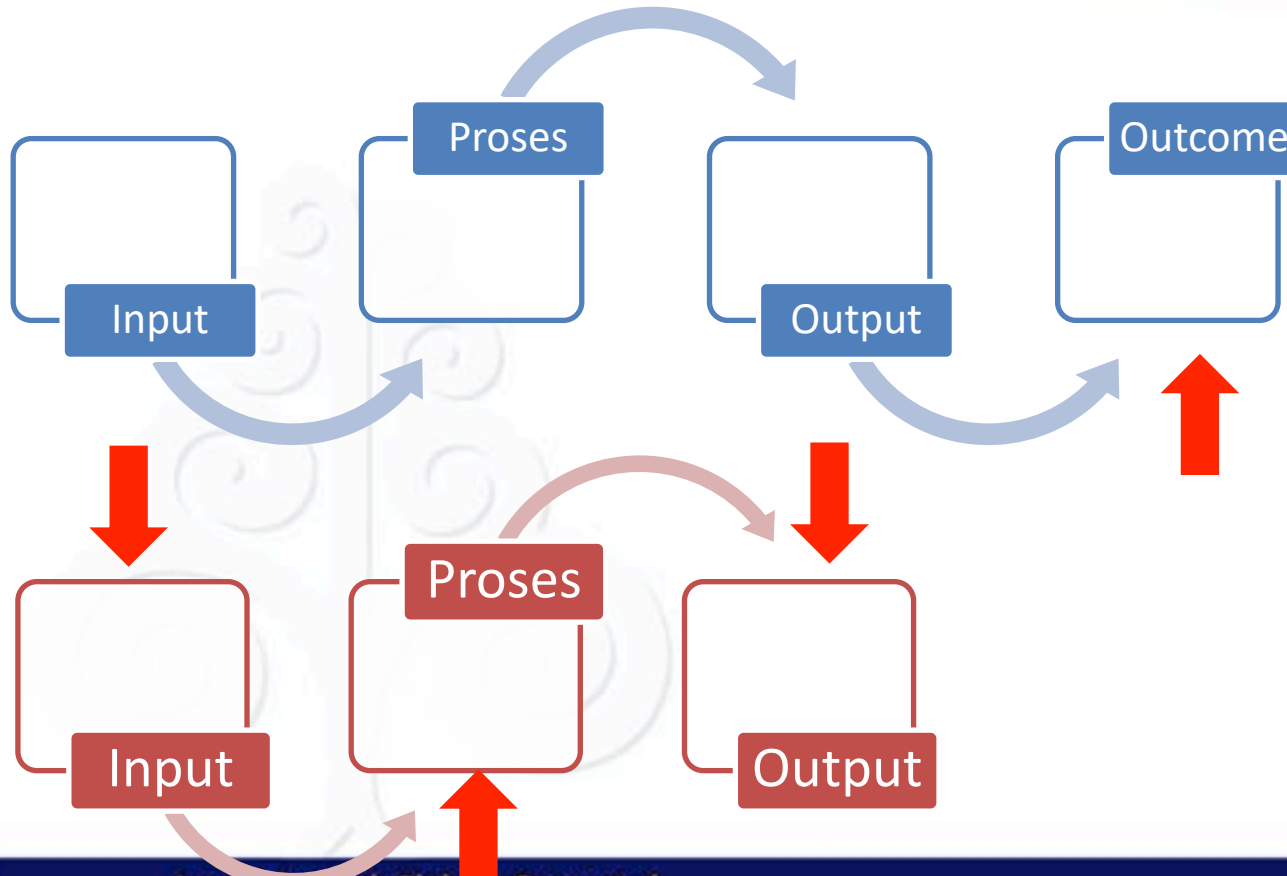
- Koordinasi antar K/L sulit dilakukan karena koordinasi dan sinergi bertentangan dengan KPI K/L
- Koordinasi menjadi beban bagi K/L yang digaji dengan cara rasional dan manusiawi.
- Selama system insentif tidak rasional dan tidak manusiawi, pencapaian outcome sulit dilakukan.

# Kesalahan KPI untuk K/L



- Kesalahan Sistem Insentif:
  - *Key Performance Indicator*/KPI untuk Kementerian/Lembaga (K/L) adalah **PENYERAPAN ANGGARAN**
  - *Take home pay* ASN = berbanding lurus dengan penyerapan anggaran
- Fakta:
  - Kemampuan **PENYERAPAN** anggaran K/L dengan tingkat **KESEJAHTERAAN** rakyat (outcomes) belum tentu terkait!!
  - Anggaran = input, Kegiatan = output, Dampak ke **KESEJAHTERAAN** = Outcome
- KPI ini belum berubah sejak jaman ORBA!!!

# Miskoordinasi Akibat Heterogenitas Insentif



## Kondisi ideal

- Fokus pada outcome
- Memerlukan sumber daya yang lebih besar
- Lebih kompleks

## Fakta faktual

- KPI kadang input, proses dan output
- Delivery lebih mudah
- Potensi *moral hazard* dan *adversed selection* tinggi



# Kebutuhan Mainstreaming Sistem Penggajian

KPI:  
• Input  
• Proses  
• Output



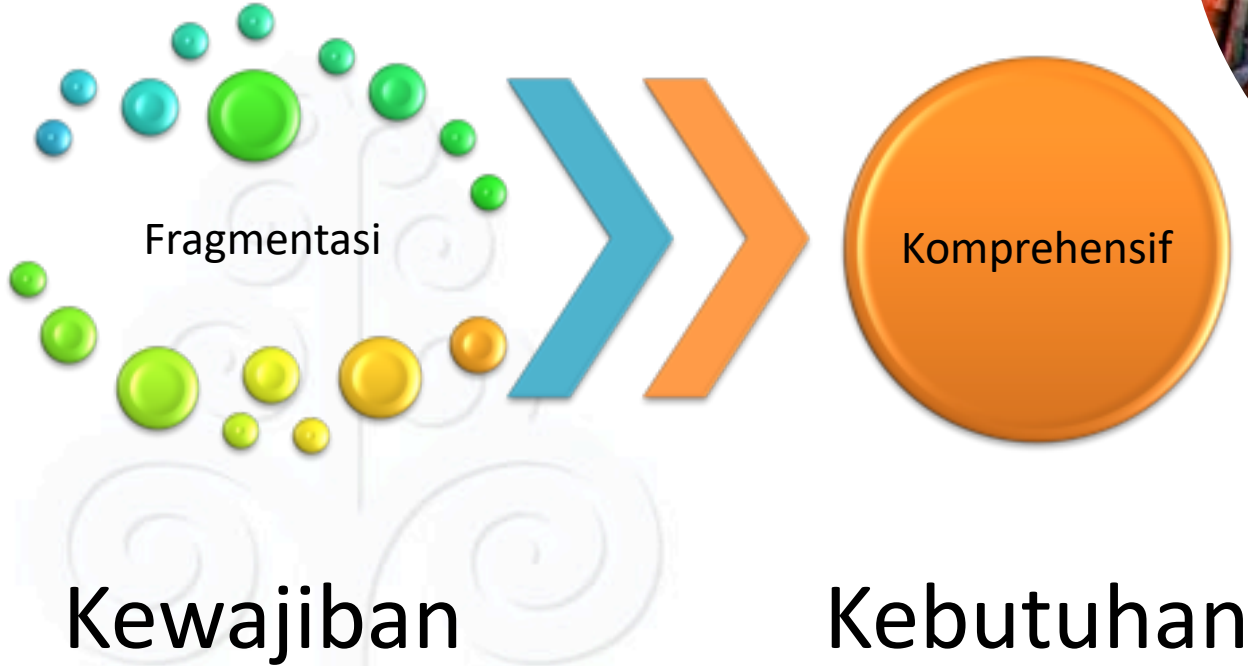
60%-70% anggaran program untuk keperluan 'peningkatan pendapatan'

Sistem Non Single Salary System (K/L)

Single Salary System (KPK)



# Perubahan Motivasi Melawan Korupsi & Perbaiki Tata Kelola

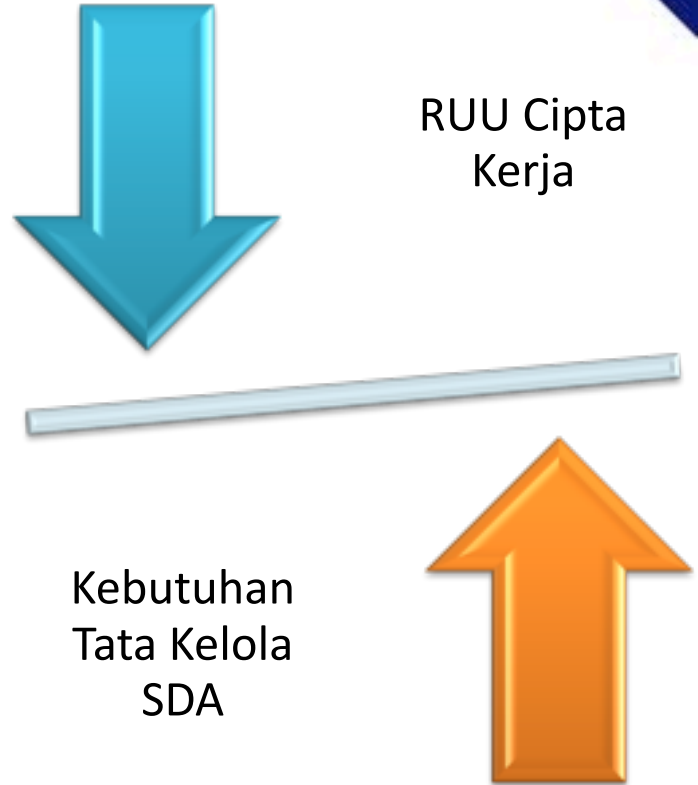




# RUU Cipta Karya dan Tata Kelola SDA



- Risiko terbesar perbaikan tata kelola SDA justru berasal dari RUU Cipta Kerja
- RUU Cipta Kerja tidak meningkatkan kualitas kelembagaan (rule of law dan enforcement) namun justru melonggarkan semua aspek pengendalian.
- Tidak ada negara maju yang tidak melakukan reformasi di masa lalu
- Tidak ada negara maju dengan peraturan yang ketat ttg pengelolaan SDA-nya.
- Mengapa Indonesia justru berlawanan dengan best practice di negara maju tersebut?



# Aspek Perizinan

## Cakupan Perizinan:

1. Perizinan Dasar (Lokasi, Lingkungan, Gedung)
2. Perizinan Sektoral (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Migas, Minerba, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Ketenaganukliran, Perindustrian, Perdagangan, Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Pariwisata, Pendidikan, Keagamaan, Transportasi, PUPR, Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pertahanan dan Keamanan)
3. Kemudahan Persyaratan Investasi. Mencabut DNI di 15 UU sektor: **UU Pelayaran, UU Penerbangan, UU Hortikultura, UU perkebunan, UU peternakan dan kesehatan hewan, UU jasa konstruksi, UU Penyiaran, UU Pos, UU Migas, UU Pendidikan Tinggi, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perbankan, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Industri Pertahanan dan UU Pers**



# Transformasi ke RBA

- Transformasi sistem perizinan dari License Based ke Risk Based Approach (RBA).  
Cakupan RBA: hanya terbatas pada K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) dan pengelolaan SDA tertentu. Selain K3L dan pengelolaan SDA tertentu, perijinan hanya berbasis standar yang dilakukan oleh individu bersertifikasi
- **Kewenangan Pemda dalam perizinan digantikan oleh Pemerintah Pusat.**
  - **Terjebak pada dikotomi Sentralisasi vs Desentralisasi.**
- **Alternatif solusi:**
  - **Koordinasi pemerintah pusat dan pemda dalam perizinan dan pembangunan database.**



# Salah Kaprah Referensi RBA di NA

- Acuan yang digunakan NA terkait RBA adalah: OECD dan UK
- Fakta di UK:
  - **UK menggunakan Orange Book (2020, 2004), namun buku ini bukan berisi kebijakan tentang perizinan berbasis risiko (RBA).**
  - **Orange Book (2020) hanyalah buku panduan implementasi *risk management (risk culture)* untuk sektor public di Inggris.**
  - Di tahun 2012, muncul proposal alternatif untuk risk management yaitu BRDO (Better Regulatory Delivery Office). BRDO tidak digunakan, dan memutuskan menggunakan Orange Book (2020).
  - BRDO sekarang ada di Office for Product Safety and Standards, Department for Business, Energy and Industrial Strategies yang mengatur standar produk di pasar.
  - **BRDO juga tidak mengatur perizinan berbasis RBA seperti di NA.**



# Orange Book (2020) - UK



- Orange Book (2020) bukanlah panduan penerapan perizinan berbasis risiko (RBA).
- Orange Book (2020) hanyalah buku panduan bagi sektor publik di Inggris untuk mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen risiko (risk management)
  - Orang Book, hal 2: *“This updated guidance builds on the previous Orange Book to help improve risk management further and to embed this as a routine part of how we operate.”*
  - Orang Book, hal 3: *“The document sets out main and supporting principles for risk management in government.”*

- Transparansi
- Terbuka untuk dikritisi
- Mengedepankan kolaborasi, konsultasi dan kerjasama
- *Continues improvement*

Manajemen Risiko

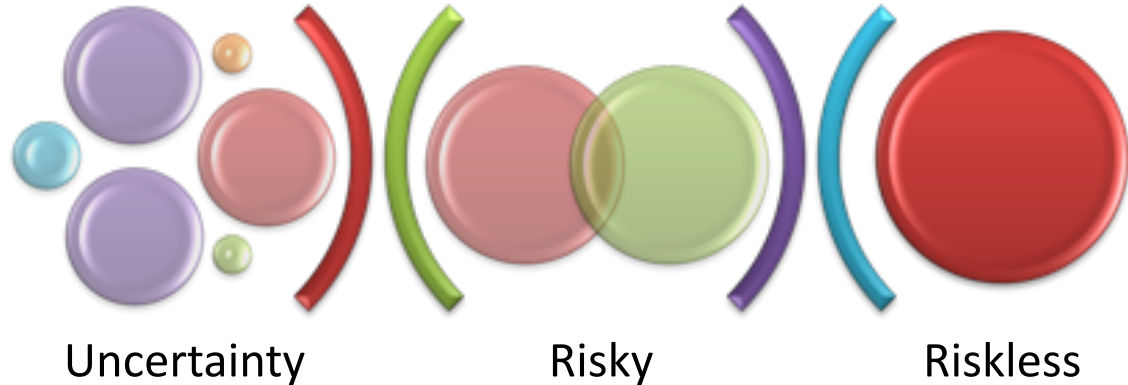
Necessary Condition

Sufficient Conditions

# Data: Tulang Punggung RBA



- **Fakta: Database Indonesia SANGAT LEMAH**



- Sebagian uncertain prospect dapat ditransformasikan menjadi risky prospect selama kita memiliki data memadai dan melakukan analisis statistika secara seksama
  - prakiraan cuaca, potensi badai, kecepatan angin, dll
  - Potensi krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dll
- Sebagian uncertain prospect tidak bisa diestimasi menjadi risky prospect:
  - Gempa bumi, tanah longsor, dll.
- **Sebagian bencana baru diketahui setelah ada (black swan phenomenon)**



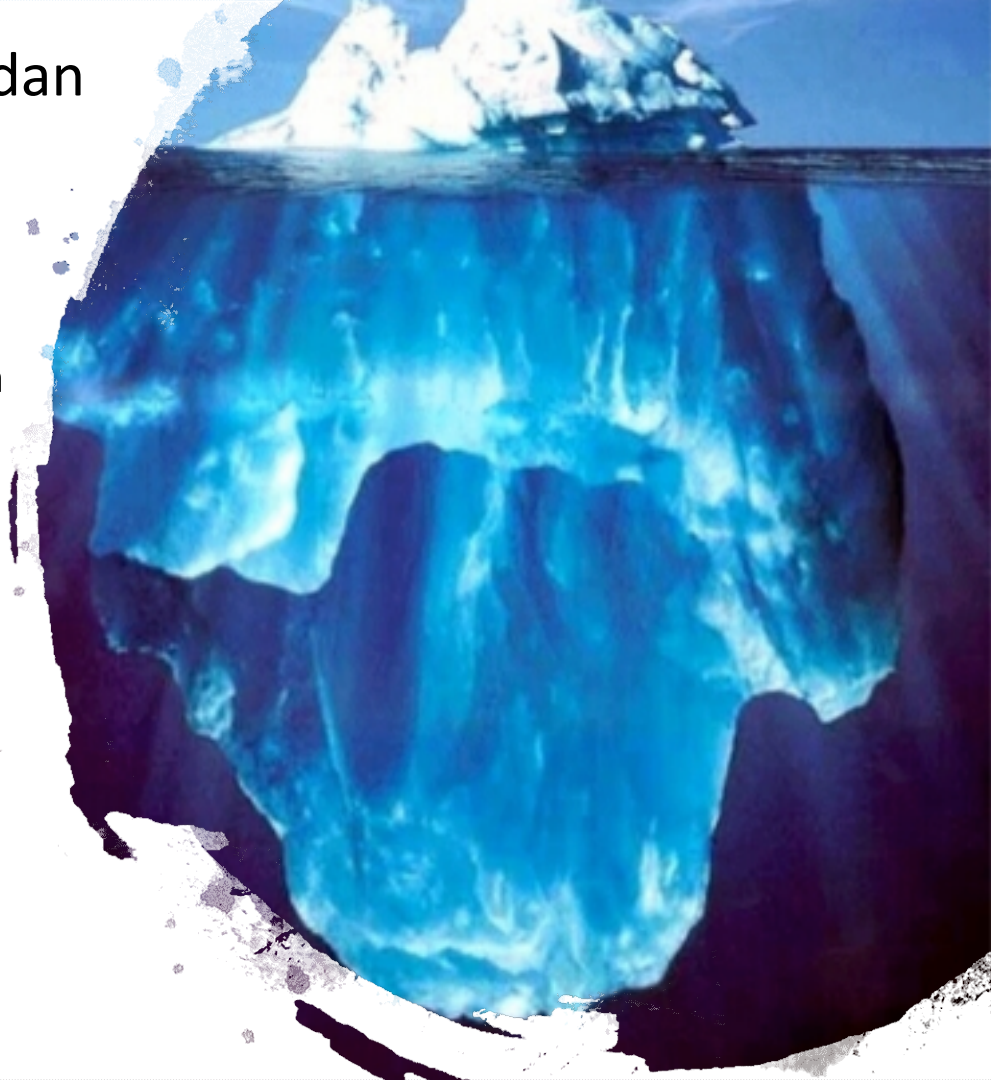
# Persepsi Risiko: Indonesia vs OECD

- Di negara OECD, tidak ada sektor informal.
  - UMKM di negara OECD adalah sektor formal
  - Di negara OECD, usaha yang langsung berhubungan dengan masyarakat diatur ketat (restaurant, café, dll)
- Di Indonesia, keberadaan sektor informal sangat besar dalam perekonomian
  - Tidak ada perijinan bagi sektor informal, meskipun memiliki risiko tinggi (warung makan, pedagang keliling, dll)
- **Apa yang dianggap berisiko tinggi di negara OECD, ternyata tidak dianggap berisiko tinggi dan bahkan tidak diatur di Indonesia.**
- **Bagaimana NA dan OL Ciptaker mengomodasi masalah fundamental seperti ini?**



# Lubang Besar Konsep RBA di NA dan RUU Cipta Kerja

- Fenomena Covid-19 menjadi bukti bahwa terdapat hal yang belum pernah terjadi kemudian terjadi dan membawa dampak tinggi.
  - Adapula fenomena sering terjadi tetapi juga membawa dampak tinggi.
  - Penipuan berkedok “SMS mama/papa minta pulsa”
  - Kasus keracunan/kesehatan karena street food yang tidak berizin.
  - Bagaimana penentuan risiko berdasarkan RBA untuk hal-hal merugikan masyarakat seperti ini?
  - Apakah itu semua perlu RBA atau justru lisensi dengan pengawasan yang ketat?
- **Lubang besar RBA dibuat dengan tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi pengawas penentu risiko di berbagai sektor!!**



# Potensi *Legal Abuse* RBA

- **Mengapa konsep RBA di OL justru menggunakan pendekatan one fits for all?**
  - Kontras dengan literatur OL (OECD 2010) itu sendiri.
  - Best practice penerapan perizinan berbasis risiko di negara lain belum jelas
  - Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.
  - Begitu banyak Database di level individu di Indonesia yang harus dibangun. Riset penerapan risiko di sektor public masih terbatas.
  - Menerapkan suatu konsep yang belum difahami secara seksama, menciptakan potensi legal abuse.
- **Niat baik tidak akan pernah menjadi hal baik jika terjadi legal abuse!!!**





UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Matur Sembah Nuwun



# 1000 GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA MERUSAK LINGKUNGAN



**INFORMASI #1000GAGASANEKONOMI SELENGKAPNYA**

[bit.ly/1000Gagasan](https://bit.ly/1000Gagasan)

**SAMPAIKAN GAGASANMU KE**

[1000gagasan@madaniberkelanjutan.id](mailto:1000gagasan@madaniberkelanjutan.id)

**SYARAT DAN KETENTUAN**

[bit.ly/Kontribusi1000gagasan](https://bit.ly/Kontribusi1000gagasan)